

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, dan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp3.712.434.360.163,46
b. Belanja	<u>Rp3.715.604.258.925,54</u>
c. Surplus/(defisit)	Rp (3.169.898.762,08)
-Penerimaan	Rp 27.291.476.128,01
-Pengeluaran	<u>Rp 5.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 22.291.476.128,01
d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	
Surplus/(defisit)	Rp (3.169.898.762,08)
Pembiayaan Netto	<u>Rp 22.291.476.128,01</u>
	Rp 19.121.577.365,93

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih realisasi dengan anggaran pendapatan sejumlah Rp(197.780.586.298,97) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Realisasi	Rp3.712.434.360.163,46
b.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	<u>Rp3.910.214.946.462,43</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp (197.780.586.298,97)

- (2) Selisih realisasi dengan anggaran belanja sejumlah Rp(216.896.891.974,90) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Realisasi	Rp3.715.604.258.925,54
b.	Anggaran belanja setelah perubahan	<u>Rp3.932.501.110.900,44</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp (216.896.851.974,90)

- (3) Selisih realisasi dengan anggaran surplus/(defisit) sejumlah Rp19.116.265.675,93 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Realisasi	Rp (3.169.898.762,08)
b.	Anggaran Surplus/ (defisit)	
	Setelah perubahan	<u>Rp (22.286.164.438,01)</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 19.116.265.675,93

- (4) Selisih realisasi dengan anggaran penerimaan pembiayaan sejumlah Rp5.311.690,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Realisasi	Rp 27.291.476.128,01
b.	Anggaran penerimaan pembiayaan	
	Setelah perubahan	<u>Rp 27.286.164.438,01</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 5.311.690,00

- (5) Selisih realisasi dengan anggaran pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Realisasi	Rp 5.000.000.000,00
b.	Anggaran pengeluaran pembiayaan	
	Setelah perubahan	<u>Rp 5.000.000.000,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 0,00

- (6) Selisih realisasi dengan anggaran pembiayaan netto sejumlah Rp5.311.690,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Realisasi	Rp 22.291.476.128,01
----	-----------	----------------------

b. Anggaran pengeluaran pembiayaan

Setelah perubahan	Rp 22.286.164.438,01
Selisih lebih/(kurang)	Rp 5.311.690,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2025 adalah:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 27.286.164.438,01
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	
Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 27.208.640.128,01
Sub Total	Rp 77.524.310,00
b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp 19.121.577.365,93
c. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp (77.524.310,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 19.121.577.365,93

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2025 adalah:

a. Jumlah aset	Rp6.815.191.552.141,75
b. Jumlah kewajiban	Rp 409.238.846.679,17
c. Jumlah ekuitas	Rp6.405.952.705.462,58

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp3.821.021.620.282,91
b. Beban	Rp3.875.181.517.994,60
c. Surplus/defisit Kegiatan Operasional	Rp (54.159.897.711,69)
d. Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional	Rp (18.275.061.807,00)
e. Surplus/defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp (72.434.959.518,69)
f. Surplus/defisit Dari Pos Luar Biasa	Rp (0,00)
g. Surplus/defisit-LO	Rp (72.434.959.518,69)

Pasal 7

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Saldo awal kas per 1 Januari 2025	Rp 27.810.220.201,59
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 175.830.014.060,91
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp(184.603.529.192,16)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp 82.836.000,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp (255.516.356,62)
f. Saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp 0,00
g. Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp 311.609.541,00
h. Saldo akhir kas di BLUD	Rp 2.499.584.868,03
i. Saldo akhir kas di Bendahara BOS	Rp 1.986.989.519,00
j. Saldo akhir kas lainnya	Rp 201.711.431,00
k. Saldo akhir kas per 31 Desember 2025	Rp 19.356.640.775,93

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

Ekuitas Awal	Rp6.454.280.263.239,55
Surplus/Defisit-LO	Rp (72.434.959.518,69)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp 136.050.877,00
- Lain-lain	Rp 23.971.350.864,72
Ekuitas Akhir	Rp6.405.952.705.462,58

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas :
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas :
- Lampiran XX.1 : Iktisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Iktisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 10

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

MISNI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026 NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU:



PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	3.910.214.946.462,43	3.712.434.360.163,46	94,94	3.958.295.361.262,68
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.904.763.732.160,43	1.736.336.133.204,89	91,15	1.980.461.763.464,68
4.1.01	Pajak Daerah	1.617.238.624.316,00	1.447.285.058.158,50	89,49	1.777.704.385.140,00
4.1.02	Retribusi Daerah	168.940.551.756,24	171.517.367.082,00	101,52	148.286.242.017,30
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.100.000.000,00	2.275.536.541,00	73,40	1.904.909.335,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	115.484.556.088,19	115.258.171.423,39	99,80	52.566.226.972,38
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.904.763.732.160,43	1.736.336.133.204,89	91,15	1.980.461.763.464,68
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.004.127.111.802,00	1.974.299.383.024,00	98,51	1.976.533.066.207,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.004.127.111.802,00	1.974.299.383.024,00	98,51	1.976.533.066.207,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2.004.127.111.802,00	1.974.299.383.024,00	98,51	1.976.533.066.207,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.324.102.500,00	1.798.843.934,57	135,85	1.300.531.591,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.324.102.500,00	1.798.843.934,57	135,85	1.300.531.591,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.324.102.500,00	1.798.843.934,57	135,85	1.300.531.591,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.910.214.946.462,43	3.712.434.360.163,46	94,94	3.958.295.361.262,68
5	BELANJA DAERAH	3.932.501.110.900,44	3.715.604.258.925,54	94,48	4.071.747.457.825,29
5.1	BELANJA OPERASI	2.944.090.151.988,51	2.779.255.950.571,38	94,40	2.987.193.758.080,43
5.1.01	Belanja Pegawai	1.468.712.653.029,50	1.448.897.643.513,04	98,65	1.309.833.869.704,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.294.788.524.618,62	1.161.921.240.159,38	89,73	1.311.138.772.714,16
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	3.692.560.273,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.864.494.061,38	834.852.991,00	29,14	944.301.180,00
5.1.05	Belanja Hibah	174.868.035.279,01	165.767.273.907,96	94,79	357.581.329.209,27
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.856.445.000,00	1.834.940.000,00	64,23	4.002.925.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.944.090.151.988,51	2.779.255.950.571,38	94,40	2.987.193.758.080,43
5.2	BELANJA MODAL	269.313.511.475,33	232.159.877.710,16	86,20	307.344.075.589,86
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	992.100.000,00	99,21	920.100.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.735.653.121,33	81.499.424.632,00	91,84	115.508.155.838,84
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.492.416.281,00	80.799.961.394,06	85,50	129.103.961.833,55
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.989.061.381,00	46.310.371.998,10	74,70	36.791.762.576,47
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.970.627.692,00	21.957.775.186,00	99,94	19.630.419.447,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.125.753.000,00	600.244.500,00	53,31	5.389.675.894,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	269.313.511.475,33	232.159.877.710,16	86,20	307.344.075.589,86
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.281.396.903,60	0,00	0,00	2.065.423.140,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.281.396.903,60	0,00	0,00	2.065.423.140,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	2.281.396.903,60	0,00	0,00	2.065.423.140,00
5.4	BELANJA TRANSFER	716.816.050.533,00	704.188.430.644,00	98,23	775.144.201.015,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	698.706.050.533,00	690.951.951.944,00	98,89	748.291.201.015,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	18.110.000.000,00	13.236.478.700,00	73,08	26.853.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	716.816.050.533,00	704.188.430.644,00	98,23	775.144.201.015,00
	JUMLAH BELANJA	3.932.501.110.900,44	3.715.604.258.925,54	94,48	4.071.747.457.825,29
	SURPLUS/DEFISIT	(22.286.164.438,01)	(3.169.898.762,08)	14,22	(113.452.096.562,61)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	22.286.164.438,01	22.291.476.128,01	100,02	140.738.261.000,62
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	27.286.164.438,01	27.291.476.128,01	100,01	232.684.048.633,62
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.286.164.438,01	27.208.640.128,01	99,71	232.583.164.925,62
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	82.836.000,00	0,00	100.883.708,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	27.286.164.438,01	27.291.476.128,01	100,01	232.684.048.633,62
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	91.945.787.633,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	91.945.787.633,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	91.945.787.633,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
	PEMBIAYAAN NETTO	22.286.164.438,01	22.291.476.128,01	100,02	140.738.261.000,62
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	19.121.577.365,93	0,00	27.286.164.438,01

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	27.286.164.438,01	231.214.715.013,24
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	27.208.640.128,01	232.583.164.925,62
Subtotal	77.524.310,00	(1.368.449.912,38)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	19.121.577.365,93	27.286.164.438,01
Subtotal	19.199.101.675,93	25.917.714.525,63
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(77.524.310,00)	1.368.449.912,38
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	19.121.577.365,93	27.286.164.438,01

GOVERNOR OF RIAU,

ANSAR AHMAD



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Pajak Daerah-LO	1.362.886.776.941,50	1.787.142.204.747,00	(424.255.427.805,50)	(23,74)
Retribusi Daerah-LO	163.297.061.511,33	155.726.470.273,30	7.570.591.238,03	4,86
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	2.275.536.541,00	1.904.909.335,00	370.627.206,00	19,46
Lain-lain PAD yang Sah-LO	97.344.328.869,85	49.872.933.967,50	47.471.394.902,35	95,18
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO	1.625.803.703.863,68	1.994.646.518.322,80	(368.842.814.459,12)	(18,49)
PENDAPATAN TRANSFER-LO				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	1.947.924.336.024,00	1.938.339.898.207,00	9.584.437.817,00	0,49
Dana Perimbangan-LO	0,00	1.938.339.898.207,00	(1.938.339.898.207,00)	(100,00)
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	294.569.205.000,00	0,00	294.569.205.000,00	100,00
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.199.371.400.647,00	0,00	1.199.371.400.647,00	100,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	453.983.730.377,00	0,00	453.983.730.377,00	100,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya LO	23.236.157.000,00	11.315.088.000,00	11.921.069.000,00	105,36
Insentif Fiskal-LO	23.236.157.000,00	11.315.088.000,00	11.921.069.000,00	105,36
Jumlah Pendapatan Transfer-LO	1.971.160.493.024,00	1.949.654.986.207,00	21.505.506.817,00	1,10
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO				
Pendapatan Hibah - LO	224.057.423.395,23	170.967.444.887,66	53.089.978.507,57	31,05
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	224.057.423.395,23	170.967.444.887,66	53.089.978.507,57	31,05
JUMLAH PENDAPATAN-LO	3.821.021.620.282,91	4.115.268.949.417,46	(294.247.329.134,55)	(7,15)
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	1.450.879.240.714,54	1.309.490.093.784,00	141.389.146.930,54	10,80
Beban Barang dan Jasa	1.321.670.657.789,70	1.466.829.936.561,96	(145.159.278.772,26)	(9,90)
Beban Bunga	0,00	3.078.651.404,00	(3.078.651.404,00)	(100,00)
Beban Subsidi	834.852.991,00	944.301.180,00	(109.448.189,00)	(11,59)
Beban Hibah	182.120.444.655,37	353.850.454.704,03	(171.730.010.048,66)	(48,53)
Beban Bantuan Sosial	1.834.940.000,00	4.002.925.000,00	(2.167.985.000,00)	(54,16)
Beban Penyisihan Piutang	1.150.870.424,67	24.667.815.407,50	(23.516.944.982,83)	(95,33)
Jumlah Beban Operasi	2.958.491.006.575,28	3.162.864.178.041,49	(204.373.171.466,21)	(6,46)
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan dan Amortisasi	378.279.897.533,32	391.610.349.705,48	(13.330.452.172,16)	(3,40)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	151.431.365.210,45	151.251.629.108,23	179.736.102,22	0,12
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	59.890.476.149,22	57.469.109.860,07	2.421.366.289,15	4,21
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	164.997.274.151,40	182.751.029.507,78	(17.753.755.356,38)	-9,71
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.960.782.022,25	138.581.229,40	1.822.200.792,85	1.314,90
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	378.279.897.533,32	391.610.349.705,48	(13.330.452.172,16)	(3,40)
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil	525.174.135.186,00	796.635.218.878,00	(271.461.083.692,00)	(34,08)
Beban Bantuan Keuangan	13.236.478.700,00	26.853.000.000,00	(13.616.521.300,00)	(50,71)
Jumlah Beban Transfer	538.410.613.886,00	823.488.218.878,00	(285.077.604.992,00)	(34,62)
JUMLAH BEBAN	3.875.181.517.994,60	4.377.962.746.624,97	(502.781.228.630,37)	(11,48)
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(54.159.897.711,69)	(262.693.797.207,51)	208.533.899.495,83	(79,38)

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Jumlah Surplus Non Operasional-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	18.275.061.807,00	39.000.172.538,89	(20.725.110.731,89)	(53,14)
Jumlah Defisit Non Operasional-LO	18.275.061.807,00	39.000.172.538,89	(20.725.110.731,89)	(53,14)
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	(18.275.061.807,00)	(39.000.172.538,89)	20.725.110.731,89	(53,14)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA-LO	(72.434.959.518,69)	(301.693.969.746,40)	229.259.010.227,72	(75,99)
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA-LO				
Jumlah Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0,00	2.065.423.140,00	(2.065.423.140,00)	(100,00)
Jumlah Beban Luar Biasa	0,00	2.065.423.140,00	(2.065.423.140,00)	(100,00)
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	(2.065.423.140,00)	2.065.423.140,00	(100,00)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(72.434.959.518,69)	(303.759.392.886,40)	231.324.433.367,72	(76,15)

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	6.454.280.263.239,55	6.764.055.547.180,37
SURPLUS/DEFISIT-LO	(72.434.959.518,69)	(303.759.392.886,40)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	136.050.877,00	10.026.024.201,81
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Lain-lain	23.971.350.864,72	(16.041.915.256,23)
EKUITAS AKHIR	6.405.952.705.462,58	6.454.280.263.239,55

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	14.356.745.416,90	23.302.940.904,77
Kas di Bendahara Pengeluaran	311.609.541,00	19.041.006,00
Kas di BLUD	2.499.584.868,03	2.264.885.131,34
Kas Lainnya	201.711.431,00	524.292.676,64
Kas Dana BOSP	1.986.989.519,00	1.699.060.482,84
Piutang Pajak Daerah	15.748.913.159,68	99.618.122.631,00
Piutang Retribusi Daerah	4.490.691.222,00	11.437.716.976,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.348.296.838,03	18.180.173.021,32
Piutang Lainnya	96.250.000,00	96.250.000,00
Penyisihan Piutang	(19.701.173.291,11)	(66.851.818.877,95)
Beban Dibayar Dimuka	1.984.982.256,93	1.809.609.683,07
Persediaan	116.695.901.122,37	294.022.966.235,40
Jumlah Aset Lancar	143.020.502.083,83	386.123.239.870,43
INVESTASI JANGKA PANJANG		
INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN		
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN		
Investasi Permanen	135.977.916.508,00	138.205.300.338,00
Penyertaan Modal	135.977.916.508,00	138.205.300.338,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	135.977.916.508,00	138.205.300.338,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	135.977.916.508,00	138.205.300.338,00
ASET TETAP		
Tanah	1.187.619.664.254,11	1.279.193.541.736,32
Peralatan dan Mesin	2.213.822.502.843,21	2.115.169.411.496,30
Gedung dan Bangunan	2.997.282.508.161,98	2.878.738.414.770,81
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.112.540.134.981,23	4.011.564.533.138,15
Aset Tetap Lainnya	301.651.608.245,70	279.218.737.302,70
Konstruksi dalam Pengerjaan	29.005.424.963,95	25.295.808.664,94
Akumulasi Penyusutan	(4.943.566.093.920,46)	(4.549.816.476.728,71)
Jumlah Aset Tetap	5.898.355.749.529,72	6.039.363.970.380,51
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	992.008.950,00	993.008.950,00
Aset Tidak Berwujud	26.469.264.427,06	26.348.603.927,06
Aset Lain-lain	356.329.356.721,02	361.847.876.562,91
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.413.781.320,00)	(2.413.781.320,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(44.396.614.613,55)	(41.286.530.988,55)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	198.211.642.151,46	196.353.186.257,62
Jumlah Aset Lainnya	535.191.876.315,99	541.842.363.389,04

URAIAN	2025	2024
PROPERTI INVESTASI		
Properti Investasi Tanah	102.645.507.704,21	0,00
Jumlah Properti Investasi	102.645.507.704,21	0,00
JUMLAH ASET	6.815.191.552.141,75	7.105.534.873.977,98
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	144.172.310,00	14.391.867,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.270.103.058,34	0,00
Utang Belanja	205.173.955.504,00	451.420.582.417,31
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.438.973.655,37	3.466.450.196,50
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	211.027.204.527,71	454.901.424.480,81
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	198.211.642.151,46	196.353.186.257,62
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	198.211.642.151,46	196.353.186.257,62
JUMLAH KEWAJIBAN	409.238.846.679,17	651.254.610.738,43
EKUITAS		
Ekuitas	6.405.952.705.462,58	6.454.280.263.239,55
JUMLAH EKUITAS	6.405.952.705.462,58	6.454.280.263.239,55
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.815.191.552.141,75	7.105.534.873.977,98

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	1.447.285.058.158,50	1.777.704.385.140,00
Penerimaan Retribusi Daerah	7.171.631.839,00	10.634.618.841,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.275.536.541,00	1.904.909.335,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	109.396.440.389,82	30.108.755.601,70
Penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.632.475.378.327,00	1.782.713.495.768,00
Penerimaan Hibah	1.798.843.934,57	1.300.531.591,00
Jumlah Arus Masuk Kas	3.200.402.889.189,89	3.604.366.696.276,70
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	1.271.931.959.380,04	1.288.605.047.897,00
Pembayaran Barang dan Jasa	918.668.477.071,98	1.059.785.418.421,26
Pembayaran Bunga	0,00	3.692.560.273,00
Pembayaran Subsidi	834.852.991,00	944.301.180,00
Pembayaran Hibah	127.114.215.041,96	320.711.308.300,27
Pembayaran Bantuan Sosial	1.834.940.000,00	4.002.925.000,00
Pembayaran Tak Terduga	0,00	2.065.423.140,00
Pembayaran Bagi Hasil	690.951.951.944,00	748.291.201.015,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	13.236.478.700,00	26.853.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	3.024.572.875.128,98	3.454.951.185.226,53
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	175.830.014.060,91	149.415.511.050,17
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	69.710.000,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lain-lain	442.374.414,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	512.084.414,00	0,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	992.100.000,00	920.100.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	51.562.817.179,00	76.496.084.204,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	80.799.961.394,06	129.103.961.833,55
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.310.371.998,10	36.791.762.576,47
Perolehan Aset Tetap Lainnya	329.702.535,00	1.658.740.000,00
Perolehan Aset Lainnya	120.660.500,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	185.115.613.606,16	244.970.648.614,02
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(184.603.529.192,16)	(244.970.648.614,02)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	82.836.000,00	100.883.708,00
Jumlah Arus Masuk Kas	82.836.000,00	100.883.708,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah	0,00	91.945.787.633,00
Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	91.945.787.633,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	82.836.000,00	(91.844.903.925,00)

URAIAN	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	216.670.872.859,00	212.522.600.526,00
UYHD Tahun 2024	19.041.006,00	3.738.300,00
Pengembalian Jasa Giro Kas Lainnya Tahun 2024	236.913,06	2.941.227,25
Pengembalian Kas dari Bendahara Penerimaan	0,00	1.732.000,00
Pengembalian Dana SPP dari Kas BLUD	3.463.286,32	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	216.693.614.064,38	212.531.012.053,25
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	216.637.000.791,00	212.522.600.526,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jasa Giro Kas Lainnya	520.089,00	236.913,06
UYHD Tahun 2025	311.609.541,00	19.041.006,00
Jumlah Arus Keluar Kas	216.949.130.421,00	212.541.878.445,06
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	(255.516.356,62)	(10.866.391,81)
Kenaikan/ (Penurunan) Kas	(8.946.195.487,87)	(187.410.907.880,66)
Saldo Awal Kas di BUD	23.302.940.904,77	210.713.848.785,43
Saldo Akhir Kas di BUD	14.356.745.416,90	23.302.940.904,77
Kas di Bendahara Pengeluaran	311.609.541,00	19.041.006,00
Kas di BLUD	2.499.584.868,03	2.264.885.131,34
Kas Lainnya	201.711.431,00	524.292.676,64
Kas Dana BOSP	1.986.989.519,00	1.699.060.482,84
Saldo Akhir Kas	19.356.640.775,93	27.810.220.201,59

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD